



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR KINERJA KUNCI

(IKK)

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
DAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI LPPD**

TAHUN ANGGARAN 2020



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ***Dr. DENI NURCAHYA, ST., M. Si***

NIP : 19711021 200501 1 003

Pangkat : Pembina Tingkat I

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Menyatakan bahwa data yang kami kirimkan untuk penyusunan LPPD, LKPJ Kepala Daerah dan IKK LPPD Tahun Anggaran 2020 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber : Februari 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



Dr. DENI NURCAHYA, ST., M. Si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19711021 200501 1 003

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

Dinas Lingkungan Hidup menangani urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cirebon.

2. Visi Dan Misi Kabupaten Cirebon

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup memiliki target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2020. Berikut merupakan capaian kinerja dalam RKPD Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

Dinas Lingkungan Hidup menangani urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cirebon.

2. Visi Dan Misi Kabupaten Cirebon

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup memiliki target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2020. Berikut merupakan capaian kinerja dalam RKPD Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup.

Target Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 Dan 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	KET.
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
5	LINGKUNGAN HIDUP						
	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	48,30	45,24	48,54	35,24	
	Persentase hasil pemantauankualitasudara yang memenuhi baku mutu	%	75,22	82,28	75,72	78,48	
	Persentase SDA yang terkonservasi	%	4,5	-	9	2,27	
	Persentase masyarakat yang mengakses data informasi Lingkungan hidup	%	100	100	100	100	
	Nilai Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup		NA	-	Nirwacitra Tantra	-	
	Luasan ketersediaan RTH	Ha	60.170	27,76	121.559	27,78	
	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah dan Persentase pengurangan timbulan sampah	%	7,35	7,37	10,51	11,03	
	Persentase Pelayanan sampah	%	6,1	6,1	7,50	8,91	
	Persentase pengurangan sampah	%	1,25	1,27	3,01	2,12	

3. Kebijakan Umum Dan Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.36,645,013,320,- dengan realisasi sejumlah Rp.33,293,395,726,- atau 90,85%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.3,351,617,594,-. Berikut rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.672.590.400	2.324.392.500		138,97
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.672.590.400	2.324.392.500		138,97
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.672.590.400	2.324.392.500		138,97
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.672.590.400	2.324.392.500		138,97
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.672.590.400	2.324.392.500		138,97
JUMLAH PENDAPATAN		1.672.590.400	2.324.392.500		138,97
5.	BELANJA	36.645.013.320	33.293.395.726	3.351.617.594	90,85
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,658,818,520	5,942,101,211	716,717,309	89,24
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6,658,818,520	5,942,101,211	716,717,309	89,24
5.2.	BELANJA LANGSUNG	29,986,194,800	27,351,294,515	2,634,900,285	91,21
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.825.305.000	6.379.542.000	445.763.000	93,47
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.037.270.740	14.213.081.515	1.824.189.225	88,63
5.2.3.	BELANJA MODAL	7.123.619.060	6.758.671.000	364.948.060	94,88
JUMLAH BELANJA		36.645.013.320	33.293.395.726	3.351.617.594	90,85
SURPLUS / (DEFISIT)		(34.972.422.920)	(30.969.003.226)	(4.003.419.694)	88,55

Selain mengelolah Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup tidak memperoleh Anggaran yang berasal dari APBN atau APBD Provinsi Jawa Barat.

Pengelolaan Anggaran APBN dan APBD Provinsi Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%	Ket.
1	APBN					NIHIL
1.1	Kementerian xxx					
2	APBD Prov Jabar					
2.1	Dinas xxx					

B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Untuk capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, selanjutnya dapat dilihat pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam laporan ini.

2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon diukur dari pencapaian Target Misi Bupati yang tertuang dalam perencanaan yang terukur. Target misi Bupati tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikut merupakan capaian atas target kinerja Tahun 2019 dan 2020.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020
	MISI KABUPATEN CIREBON MAJU					
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	50,58	53,50	50,81	53,38

C. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan atas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan.

Pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian Tugas Pembantuan tersebut adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Kementerian dan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar **NIHIL**.

**DAFTAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Bidang Urusan	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi CapaianKegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1		Kementerian/ LPNK	PeraturanMenteri/LP NK No.TahunTtg.	Program Kegiatan Keluaran (Output) RincianKegiatan	NIHIL		NIHIL		NIHIL	
2		Dinas..... Prov. Jabar	PeraturanGubernur No. ... Tahun..... Ttg.	Program Kegiatan Keluaran (Output) RincianKegiatan	NIHIL		NIHIL		NIHIL	
3										

KETERANGAN :

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan

Kolom (3) diisi kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian/ Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memberikan penugasan (TP)

Kolom (4) diisi Peraturan Menteri/ lembaga pemerintah non kementerian peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (5) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi

Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA

Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah

Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase

Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan

Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

2. Permasalahan dan Solusi

Karena tidak mendapat Tugas Pembantuan, maka Dinas Lingkungan Hidup tidak menghadapi beberapa permasalahan dan tidak harus melakukan solusi-solusi yang berkaitan dengan Tugas Pembantuan.

3. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan tidak ada saran dan tindak lanjut yang disampaikan.

4. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Urusan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.2,541,151,300,- dan terealisasi sebesar Rp.1,959,693,596,- sisa sebesar Rp.581,457,704,- atau tercapai sebesar 77,12%.

Sementara Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.27,445,043,500,- dan terealisasi sebesar Rp.25,391,600,919,- sisa sebesar Rp.2,053,442,581,- atau tercapai sebesar 92,52%.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup terinci sebagai berikut:

Belanja Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
BELANJA	36.645.013.320	33.293.395.726	3.351.617.594	90,85
BELANJA LANGSUNG	29,986,194,800	27,351,294,515	2,634,900,285	91.21%
BELANJA NON URUSAN				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,117,354,300	744,240,100	373,114,200	66.61%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180,000,000	135,802,963	44,197,037	75.45%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	85,000,000	78,035,900	6,964,100	91.81%

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	87,610,000	87,440,000	170,000	99.81%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	91,000,000	76,140,500	14,859,500	83.67%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	294,793,800	132,180,300	162,613,500	44.84%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	23,928,400	21,950,000	1,978,400	91.73%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,262,100	9,755,300	1,506,800	86.62%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	149,400,000	131,870,000	17,530,000	88.27%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	71,360,000	16,435,000	54,925,000	23.03%
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	123,000,000	54,630,137	68,369,863	44.41%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,003,273,600	856,044,420	147,229,180	85.33%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	369,723,600	319,037,020	50,686,580	86.29%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	220,830,000	177,853,400	42,976,600	80.54%
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	412,720,000	359,154,000	53,566,000	87.02%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	312,380,000	251,987,500	60,392,500	80.67%
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	312,380,000	251,987,500	60,392,500	80.67%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60,067,000	59,739,034	327,966	99.45%
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,075,000	26,747,034	327,966	98.79%

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	16,496,000	16,496,000	0	100.00%
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	16,496,000	16,496,000	0	100.00%
Program Pengembangan Sistem Perencanaan sektoral	48,076,400	47,682,542	393,858	99.18%
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	48,076,400	47,682,542	393,858	99.18%
BELANJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	20,526,067,100	19,061,841,629	1,464,225,471	92.87%
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	6.384.982.000	6.136.104.540	248.877.460	96,10%
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	6.134.871.300	5.631.304.206	503.567.094	91,79%
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4.379.396.000	3.921.120.296	458.275.704	89,54%
Kegiatan Peningkatan Operasi Pemrosesan Akhir Sampah	3.626.817.800	3.373.312.587	253.505.213	93,01%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	997,574,300	944,161,049	53,413,251	94.65%
Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	16.499.500	15.249.500	1.250.000	92,42%
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	100.000.000	98.344.550	1.655.450	98,34%
Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	138.125.000	132.312.120	5.812.880	95,79%
Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan	238.800.000	227.573.534	11.226.466	95,30%

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	105.000.000	104.697.144	302.856	99,71%
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	60.350.000	60.350.000	0	100,00%
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	92.499.800	92.499.800	0	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL	160.300.000	134.563.781	25.736.219	83,94%
Kegiatan Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan	86.000.000	78.570.620	7.429.380	91,36%
Kegiatan Penanganan Limbah Home Industri	-	-	-	-
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	14,430,000	14,430,000	0	100,00%
Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	14.430.000	14.430.000	0	100,00%
Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	-	-	-
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	425,000,000	373,251,144	51,748,856	87,82%
Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	200.000.000	199.051.144	948.856	99,53%
Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	225.000.000	174.200.000	50.800.000	77,42%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.481.972.100	4.997.917.097	484.055.003	91,17%

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Kegiatan Penataan RTH	3.277.240.900	3.020.857.547	256.383.353	92,18%
Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.204.731.200	1.977.059.550	227.671.650	89,67%
JUMLAH BELANJA	36.645.013.320	33.293.395.726	3.351.617.594	90,85%

Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2020 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Urusan yang Melekat pada SKPD (Non Urusan)

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di SKPD khususnya pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 5 (lima) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Program dan Kegiatan Non Urusan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020

NO	Uraian Urusan, SKPD, Bidang/Bagian, Program dan Kegiatan	Jumlah Alokasi(Rp)	Jumlah Realisasi(Rp)	%
NON URUSAN				
SEKRETARIAT				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.117.354.300	744.240.100	66,61%
1	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	135.802.963	75,45%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	85.000.000	78.035.900	91,81%
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	87.610.000	87.440.000	99,81%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	91.000.000	76.140.500	83,67%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	294.793.800	132.180.300	44,84%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	23.928.400	21.950.000	91,73%
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.262.100	9.755.300	86,62%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	149.400.000	131.870.000	88,27%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	71.360.000	16.435.000	23,03%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	123.000.000	54.630.137	44,41%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.003.273.600	856.044.420	85,33%
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	369.723.600	319.037.020	86,29%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	220.830.000	177.853.400	80,54%
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	412.720.000	359.154.000	87,02%

NO	Uraian Urusan, SKPD, Bidang/Bagian, Program dan Kegiatan	Jumlah Alokasi(Rp)	Jumlah Realisasi(Rp)	%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	312.380.000	251.987.500	80,67%
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	312.380.000	251.987.500	80,67%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.067.000	59.739.034	99,45%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.075.000	26.747.034	98,79%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	16.496.000	16.496.000	100,00%
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	16.496.000	16.496.000	100,00%
5	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	48.076.400	47.682.542	99,18%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	48.076.400	47.682.542	99,18%

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.1.117.354.300,- dan terealisasi sebesar Rp.744.240.100,- sisa sebesar Rp.373.114.200,- atau tercapai sebesar 66,61%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.135.802.963,- sisa sebesar Rp.44.197.037,- atau tercapai sebesar 75,45%.

Output kegiatan adalah jumlah jasa yang dibayar (telepon, air, listrik).
Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.78.035.900,- sisa sebesar Rp.6.964.100,- atau tercapai sebesar 91,81%.

Output kegiatan adalah jumlah kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, kendaraan roda 4 atau lebih yang dibayar pajak STNK dan KIR.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.610.000,- dan terealisasi sebesar Rp.87.440.000,- sisa sebesar Rp.170.000,- atau tercapai sebesar 99,81%.

Output kegiatan adalah jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dari kerusakan.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.

- d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.76.140.500,- sisa sebesar Rp.14.859.500,- atau tercapai sebesar 83,67%.

Output kegiatan adalah jumlah alat tulis untuk kebutuhan kantor.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.

- e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.294.793.800,- dan terealisasi sebesar Rp.132.180.300,- sisa sebesar Rp.162.613.500,- atau tercapai sebesar 44,84%.

Output kegiatan adalah jumlah barang cetak dan penggandaan.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.

- f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.928.400,- dan terealisasi sebesar Rp.21.950.000,- sisa sebesar Rp.1.978.400,- atau tercapai sebesar 91,73%.

Output kegiatan adalah jumlah komponen peralatan listrik/penerangan.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.

- g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.262.100,- dan terealisasi sebesar Rp.9.755.300,- sisa sebesar Rp.1.506.800,- atau tercapai sebesar 86,62%.

Output kegiatan adalah jumlah peralatan rumah tangga.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.

- h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 131.870.000,- sisa sebesar Rp.17.530.000,- atau tercapai sebesar 88,27%.

Output kegiatan adalah jumlah bahan bacaan dan publikasi.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.

- i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.435.000,- sisa sebesar Rp.54.925.000,- atau tercapai sebesar 23,03%.

Output kegiatan adalah jumlah makanan dan minuman untuk rapat / tamu.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.

- j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.54.630.137,- sisa sebesar Rp.68.369.863,- atau tercapai sebesar 44,41%.

Output kegiatan adalah jumlah pelaksanaan rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp.1.003.273.600,- dan terealisasi sebesar Rp.856.044.420,- sisa sebesar Rp.147.229.180,- atau tercapai sebesar 85,33%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.369.723.600,- dan terealisasi sebesar Rp.319.037.020,- sisa sebesar Rp.50.686.580,- atau tercapai sebesar 86,29%.

Output kegiatan adalah jumlah gedung kantor yang dirawat.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana penunjang kinerja aparatur.

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.220.830.000,- dan terealisasi sebesar Rp.177.853.400,- sisa sebesar Rp.42.976.600,- atau tercapai sebesar 80,54%.

Output kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 yang dirawat.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana penunjang kinerja aparatur.

- c. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.412.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp.359.154.000,- sisa sebesar Rp.53.566.000,- atau tercapai sebesar 87,02%.

Output kegiatan adalah jumlah gedung kantor yang direhab sedang / berat.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana penunjang kinerja aparatur.

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp.312.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp.251.987.500,- dengan sisa sebesar Rp.60.392.500,- atau tercapai sebesar 80,67%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.312.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp.251.987.500,- dengan sisa sebesar Rp.60.392.500,- atau tercapai sebesar 80,67%.

Output kegiatan adalah jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya disiplin pegawai.

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.60.067.000,- dan terealisasi sebesar Rp.59.739.034,- dengan sisa sebesar Rp.327.966,- atau tercapai sebesar 99,45%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.075.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.747.034,- dengan sisa sebesar Rp.327.966,- atau tercapai sebesar 98,79%.

Output kegiatan adalah jumlah penyusunan laporan tahunan (LPPD, LKPJ, LAKIP), laporan fisik keuangan triwulan, dan laporan monev program dan kegiatan.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan.

- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.496.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.496.000,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100,00%.

Output kegiatan adalah jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan.

- c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.496.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.496.000,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100,00%.

Output kegiatan adalah jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Outcome kegiatan adalah terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan.

(5) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor.

Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor sebesar Rp.48.076.400,- dan terealisasi sebesar Rp.47.682.542,- dengan sisa sebesar Rp.393.858,- atau tercapai sebesar 99,18%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.076.400,- dan terealisasi sebesar Rp.47.682.542,- dengan sisa sebesar Rp.393.858,- atau tercapai sebesar 99,18%.

Output kegiatan adalah jumlah penyusunan laporan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Outcome kegiatan adalah terwujudnya dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.

2) Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan), Dinas Lingkungan Hidup menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

- (1) Pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.294.793.800,- dan terealisasi sebesar Rp.132.180.300,- sisa sebesar Rp.162.613.500,- atau tercapai sebesar 44,84%, ini merupakan pengadaan karcis retribusi sampah yang tidak bisa terserap semua karena sampai dengan akhir Desember 2020 jumlah stok masih cukup banyak, terkait beberapa pasar yang tidak lagi di kelola kebersihannya oleh kita.
- (2) Pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.435.000,- sisa sebesar Rp.54.925.000,- atau tercapai sebesar 23,03%, ini berkaitan dengan pembatasan sosial terutama tamu dan rapat-rapat.
- (3) Pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.54.630.137,- sisa sebesar Rp.68.369.863,- atau tercapai sebesar 44,41%, ini juga terkait dengan pembatasan sosial dalam mobilitas perjalanan dinas.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:

- (1) Menghitung kembali kebutuhan karcis retribusi yang harus di cetak untuk keperluan pemungutan retribusi terutama pasar yang di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk kebersihannya.
- (2) Menyesuaikan kembali penganggaran makan dan minuman tamu atau rapat-rapat di masa pandemi ini.
- (3) Menyesuaikan anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah di masa pandemi ini.

3) Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di SKPD (Non Urusan), Dinas Lingkungan Hidup perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon memiliki UPT yang salah satu di antaranya adalah UPT Laboratorium Lingkungan (Labling). Kepala UPT nya sudah dilantik dan aktif tetapi tidak mempunyai gedung kantor dan staff. Untuk pembangunan gedung UPT Labling membutuhkan anggaran, dan ini masih belum bisa kita anggarkan di APBD Kabupaten Cirebon.

2. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang merupakan tugas utama dari Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 5 (lima) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020

NO	Uraian Urusan, SKPD, Bidang/Bagian, Program dan Kegiatan	Jumlah Alokasi(Rp)	Jumlah Realisasi(Rp)	%
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	20.526.067.100	19.061.841.629	92,87%
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	6.384.982.000	6.136.104.540	96,10%
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	6.134.871.300	5.631.304.206	91,79%
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4.379.396.000	3.921.120.296	89,54%
4	Peningkatan Operasi Pemrosesan Akhir Sampah	3.626.817.800	3.373.312.587	93,01%
2	Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	997.574.300	944.161.049	94,65%
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	16.499.500	15.249.500	92,42%
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	100.000.000	98.344.550	98,34%
3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	138.125.000	132.312.120	95,79%
4	Pengkajian Dampak Lingkungan	238.800.000	227.573.534	95,30%
5	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	105.000.000	104.697.144	99,71%
6	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	60.350.000	60.350.000	100,00%
7	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	92.499.800	92.499.800	100,00%
8	Koordinasi Penyusunan AMDAL	160.300.000	134.563.781	83,94%
9	Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan	86.000.000	78.570.620	91,36%
10	Penanganan Limbah Home Industri	-	-	-
3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	14.430.000	14.430.000	100,00%
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	14.430.000	14.430.000	100,00%

NO	Uraian Urusan, SKPD, Bidang/Bagian, Program dan Kegiatan	Jumlah Alokasi(Rp)	Jumlah Realisasi(Rp)	%
2	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	-	-
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	-	-	-
4	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	425.000.000	373.251.144	87,82%
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	200.000.000	199.051.144	99,53%
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	225.000.000	174.200.000	77,42%
5	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.481.972.100	4.997.917.097	91,17%
1	Penataan RTH	3.277.240.900	3.020.857.547	92,18%
2	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.204.731.200	1.977.059.550	89,67%

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

(1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.20.526.067.100,- dan terealisasi sebesar Rp.19.061.841.629,- dengan sisa sebesar Rp.1.464.225.471,- atau tercapai sebesar 92,87%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.384.982.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.136.104.540,- dengan sisa sebesar Rp.248.877.460,- atau tercapai sebesar 96,10%.

Output kegiatan adalah jumlah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

Outcome kegiatan adalah prosentase cakupan pelayanan sampah dan timbulan sampah yang berkurang.

b. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.134.871.300,- dan terealisasi sebesar Rp.5.631.304.206,- dengan sisa sebesar Rp.503.567.094,- atau tercapai sebesar 91,79%.

Output kegiatan adalah peningkatan pelayanan pengelolaan sampah.

Outcome kegiatan adalah prosentase cakupan pelayanan sampah dan timbulan sampah yang berkurang.

- c. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.379.396.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.921.120.296,- dengan sisa sebesar Rp.458.275.704,- atau tercapai sebesar 89,54%.

Output kegiatan adalah jumlah desa yang mengelolah sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya.

Outcome kegiatan adalah prosentase cakupan pelayanan sampah dan timbulan sampah yang berkurang.

- d. Kegiatan Peningkatan Operasi Pemrosesan Akhir Sampah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.626.817.800,- dan terealisasi sebesar Rp.3.373.312.587,- dengan sisa sebesar Rp.253.505.213,- atau tercapai sebesar 93,01%.

Output kegiatan adalah jumlah pengelolaan akhir sampah.

Outcome kegiatan adalah prosentase cakupan pelayanan sampah dan timbulan sampah yang berkurang.

(2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebesar Rp.997.574.300,- dan terealisasi sebesar Rp.944.161.049,- dengan sisa sebesar Rp.53.413.251,- atau tercapai sebesar 94,65%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.499.500,- dan terealisasi sebesar Rp.15.249.500,- dengan sisa sebesar Rp.1.250.000,- atau tercapai sebesar 92,42%.

Output kegiatan adalah jumlah penghargaan Adipura.

Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.

- b. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.98.344.550,- dengan sisa sebesar Rp.1.655.450,- atau tercapai sebesar 98,34%.

Output kegiatan adalah data base lingkungan.

Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.

- c. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.138.125.000,- dan terealisasi sebesar Rp.132.312.120,- dengan sisa sebesar Rp.5.812.880,- atau tercapai sebesar 95,79%.

Output kegiatan adalah jumlah kegiatan usaha (milik swasta maupun pemerintah daerah) yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan.

Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.

- d. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.238.800.000, dan terealisasi sebesar Rp.227.573.534,- dengan sisa sebesar Rp.11.226.466,- atau tercapai sebesar 95,30%.

Output kegiatan adalah jumlah dokumen kajian pengelolaan lingkungan hidup

Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.

- e. Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.104.697.144,- dengan sisa sebesar Rp.302.856,- atau tercapai sebesar 99,71%.

Output kegiatan adalah jumlah perusahaan yang mendapat Properda.

Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.

- f. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.60.350.000,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100,00%.

Output kegiatan adalah jumlah DAS yang disepakati sebagai Prokasih.

Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu.

- g. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp.92.499.800,- dan terealisasi sebesar Rp.92.499.800,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100,00%.

Output kegiatan adalah jumlah peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.

- h. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.134.563.781,- dengan sisa sebesar Rp.25.736.219,- atau tercapai sebesar 83,94%.

Output kegiatan adalah prosentase pelayanan penilaian dokumen lingkungan.

Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.

- i. Kegiatan Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.78.570.620,- dengan sisa sebesar Rp.7.429.380,- atau tercapai sebesar 91,36%.

Output kegiatan adalah jumlah sengketa lingkungan yang dilayani.

Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu.

- j. Kegiatan Penanganan Limbah Home Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 0,00%.

Output kegiatan adalah jumlah kawasan pengelolaan limbah.

Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu..

(3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Alokasi anggaran untuk program perlindungan dan konservasi sumber daya alam sebesar Rp.14.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.430.000,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.430.000,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100,00%.

Output kegiatan adalah jumlah mata air yang dikonservasi.

Outcome kegiatan adalah prosentase sumber daya alam yang terkonservasi.

- b. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- dengan sisa sebesar Rp.00,- atau tercapai sebesar 0,00%.

Output kegiatan adalah jumlah desa yang difasilitasi Proklim.

Outcome kegiatan adalah persentase sumber daya alam yang terkonservasi.

- c. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- dengan sisa sebesar Rp.00,- atau tercapai sebesar 0,00%.

Output kegiatan adalah jumlah kelompok masyarakat yang peduli sumber mata air.

Outcome kegiatan adalah persentase sumber daya alam yang terkonservasi.

- (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam sebesar Rp.425.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.373.251.144,- dengan sisa sebesar Rp.51.748.856,- atau tercapai sebesar 87,82%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.199.051.144,- dengan sisa sebesar Rp.948.856,- atau tercapai sebesar 99,53%.

Output kegiatan adalah jumlah sekolah berbudaya lingkungan yang dibina dan dibentuk.

Outcome kegiatan adalah persentase masyarakat yang mengakses data informasi lingkungan hidup.

- b. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.225.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.174.200.000,- dengan sisa sebesar Rp.50.800.000,- atau tercapai sebesar 77,42%.

Output kegiatan adalah jumlah penyusunan laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIPLHD).

Outcome kegiatan adalah persentase masyarakat yang mengakses data informasi lingkungan hidup.

- (5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Alokasi anggaran untuk program pengelolaan ruang terbuka hijau sebesar Rp.5.481.972.100,- dan terealisasi sebesar Rp.4.997.917.097,- dengan

sisa sebesar Rp.484.055.003,- atau tercapai sebesar 91,17%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penataan RTH, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.277.240.900,- dan terealisasi sebesar Rp.3.020.857.547,- dengan sisa sebesar Rp.256.383.353,- atau tercapai sebesar 92,18%.

Output kegiatan adalah luas pembangunan RTH, pagar dan gapura.

Outcome kegiatan adalah luasan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.

- b. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.204.731.200,- dan terealisasi sebesar Rp.1.977.059.550,- dengan sisa sebesar Rp.227.671.650,- atau tercapai sebesar 89,67%.

Output kegiatan adalah luas operasional pemeliharaan RTH.

Outcome kegiatan adalah luasan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.

2) Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

- (1) Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon masih belum mempunyai TPA Definitif. Sehingga pengelolaan sampah belum optimal.
- (2) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang, jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Cirebon. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan lahan yang akan dijadikan RTH harus berstatus aset Pemkab Cirebon.
- (3) Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam belum optimal dilakukan.
- (4) Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran belum bisa dilakukan secara optimal, terutama yang berkaitan dengan pencemaran limbah home industry.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:

- (1) Pada tahun 2021 ini melalui Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan, pengadaan tanah untuk lahan TPA di anggarkan kembali.
- (2) Bekerja sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk menginventarisir lahan-lahan kosong yang menjadi aset Pemkab, yang bisa dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau, disamping kita melakukan program CSR.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 sudah mulai melakukan konservasi, dengan melakukan penanaman pohon di sekitar mata air.
- (4) Untuk mempercepat relokasi pengusaha batu alam di sekitar Kecamatan Dukupuntang, Dinas Lingkungan Hidup sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi terkait dengan Banprop.

3) Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Untuk penanganan masalah sampah, perlu diupayakan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat, karena tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih sangat kurang.

3. Prestasi-prestasi

Penghargaan Raksa Prasada Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan / Adiwiyata Tahun 2020 Tingkat Propinsi Jawa Barat yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada:

1. SMPN 2 Sumber
2. SMPN 1 Talun
3. SMPN 1 Ciledug
4. SMKN 1 Susukan

E. TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN 2019

Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah memberikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Agar dilakukan peningkatan pengawasan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara periodik dan juga melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha sehingga diharapkan timbul kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pelaporan dokumen lingkungan hidup.
2. Mengupayakan penambahan sdm pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
3. Dalam upaya penindakan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan, diperlukan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
4. Melakukan pembukaan dan penataan TPA Gegesik yang sebelumnya tidak aktif untuk dimanfaatkan kembali.
5. Dinas Lingkungan Hidup harus mendapat anggaran yang cukup untuk pengadaan alat berat dan penambahan personel kebersihan.
6. Penanganan sampah dari desa harus dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga keberadaan TPS3R di desa tidak sia-sia.

Sehubungan dengan rekomendasi tersebut, Bupati Cirebon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

5. Dinas lingkungan hidup kabupaten cirebon pada tahun anggaran 2020 ini telah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha, dari target 250 pelaku usaha dapat terealisasi sebanyak 351 unit usaha. Juga melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara periodik yaitu di musim kemarau dan musim penghujan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan. Sosialisasi kepada para pelaku usaha juga sudah dilakukan, disamping publikasi melalui media cetak tentang penataan terhadap peraturan di bidang lingkungan juga pengawasan secara langsung dan ada beberapa perusahaan yang secara sadar melaporkan dokumen pengelolaan lingkungannya secara teratur dalam jangka waktu enam bulan sekali (laporan semester pengelolaan ukl/upl).
6. Pada pengadaan CPNS tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup telah mendapatkan penambahan pegawai sebanyak 2 (dua) orang CPNS dan rencananya kita arahkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan bisa menjadi PPLH.
7. Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam upaya penindakan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan dan dalam setiap teguran yang di tujukan kepada perusahaan, tembusannya selalu disampaikan kepada instansi terkait.
8. TPA Gegesik untuk saat ini belum bisa difungsikan terkait dengan upaya Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 telah melakukan upaya penataan dan pemanfaatan lokasi tersebut, namun terjadi penolakan dari masyarakat sekitar sehingga kami menutup kembali TPA Gegesik. Untuk selanjutnya kami merencanakan pada lokasi tersebut akan digunakan sebagai TPS 3R dan Stasiun Peralihan Antara untuk pelayanan wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Gegesik.
9. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 telah mencakup / merencanakan untuk adanya pengadaan alat berat, penambahan armada pengangkut sampah beserta personil pendukungnya.
10. Penanganan sampah di desa telah kami rencanakan dengan pola 3R sesuai kemampuan dari masing-masing desa, namun hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup dikarenakan kemampuan dari masing-masing desa sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, desa memiliki kewenangan untuk mengelolah sampah di tingkat desa.

F. PENUTUP

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat mencapainya sesuai dengan harapan tanpa ada kendala maupun hambatan yang berarti. Namun tentunya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun yang akan datang diharapkan dapat lebih baik.

Oleh karena itu, berbagai kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini sangat diharapkan agar tujuan penyusunannya dapat tercapai lebih baik.

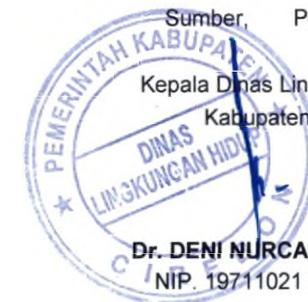
G. LAMPIRAN

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA OUTPUT	KETERANGAN
	Urusan Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	IKLH Prov = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	53,38	1	Hasil perhitungan Kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)		IKA = 35,24 IKU = 78,48 ITH = 38,10	Dibuktikan dengan dokumen terkait
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total vol timbunan sampah	25,45 ton / 1.198 ton x 100% = 2,12%	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	1. Rasio pengangkutan sampah = 8,91% 2. Kapasitas TPA = 60.000 ton 3. Tidak ada informasi	Dibuktikan dengan dokumen terkait
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha / kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan ----- x 100% Usaha / kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	163 / 276 x 100% = 59 %	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab ----- x 100% Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	107 / 107 x 100 % = 100 %	Dibuktikan dengan dokumen terkait
						2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada ----- x 100% Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemkab	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen terkait

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA OUTPUT	KETERANGAN
						3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	Jumlah MHA yang diakui ----- x 100% Jumlah usulan MHA Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara	Tidak ada	
						4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah MHA yang ada	Tidak ada	
						5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat ----- x 100% Rencana/target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	Tidak ada	
						6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	2 / 2 x 100% = 100%	

Sumber, Pebruari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon



Dr. DENI MURCAHYA, ST., M. Si
NIP. 19711021 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
SUMBER

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. DENI NURCAHYA, ST., M. Si**
NIP : 19711021 200501 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Dengan ini menerangkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tidak memiliki Taman Hutan Rakyat (Tahura).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 15 Pebruari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon,



Dr. DENI NURCAHYA ST., M. Si
NIP. 19711021 200501 1 003



GUBERNUR JAWA BARAT

Piagam Penghargaan

Nomor : 002.6/kep.800-BKD/2020

Gubernur Jawa Barat, dengan ini memberikan Penghargaan kepada :

SMPN 2 Sumber

Kabupaten Cirebon

Sebagai

*Penerima Penghargaan Raksa Prasada
Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan /Adiwiyata
Tahun 2020*

Bandung, 4 Desember 2020



MOCHAMMAD RIDWAN KAMIL



GUBERNUR JAWA BARAT

Piagam Penghargaan

Nomor : 002.6 / Kep. 800 - BKD / 2020

Gubernur Jawa Barat, dengan ini memberikan Penghargaan kepada :

SMPN 1 Talun

Kabupaten Cirebon

Sebagai

*Penerima Penghargaan Raksa Prasada
Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan / Adiwiyata
Tahun 2020*

Bandung, 4 Desember 2020



MUHAMMAD RIDWAN KAMIL



GUBERNUR JAWA BARAT
Piagam Penghargaan

Nomor : 002.6 / Kep.800 - BKD / 2020

Gubernur Jawa Barat, dengan ini memberikan Penghargaan
kepada :

SMPN 1 Ciledug
Kabupaten Cirebon

Sebagai

*Penerima Penghargaan Raksa Prasada
Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan /Adiwiyata
Tahun 2020*

Bandung, 4 Desember 2020



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



GUBERNUR JAWA BARAT

Piagam Penghargaan

Nomor : 002-6/Kep. 800- BKO / 2020

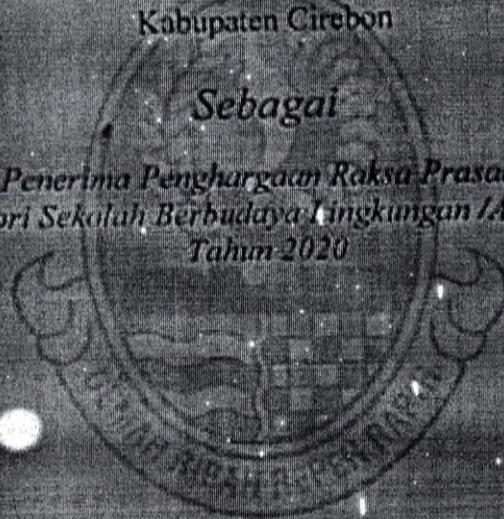
Gubernur Jawa Barat, dengan ini memberikan Penghargaan kepada :

SMKN 1 Susukan

Kabupaten Cirebon

Sebagai

Penerima Penghargaan Raksa Prasada
Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan / Adiwiyata
Tahun 2020



Bandung, 9 Desember 2020

